BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi yang menerapkan pemilihan umum dalam pemilihan pemerintahan sehingga pemilihan umum merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.¹ Pemilihan umum menjadi salah satu pilar utama dari suatu proses akumulasi kehendak masyarakat.

Pemilihan umum sebagai salah satu penerapan Hak Asasi Warga Negara sehingga dalam penerapan hak-hak tersebut adanya suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menerapkan pemilihan umum harus sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat dan harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemilihan umum menjadi salah satu ciri khas dari negara yang menerapkan sistem demokrasi dan negara demokrasi harus dibangun sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum menjadi instrumen dalam menjalankan kedaulatan rakyat, karena dengan pemilihan umum kedaulatan tersebut dapat diakomodasikan. Sebagai instrumen penting, pemilihan umum merupakan implementasi awal dari asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditegaskan oleh Miriam Budiardjo dalam pernyataannya bahwa:

¹Andina Elok Puri Maharani,Dkk, *Hukum Partai Politik Dan Sistem Pemilu: Demokrasi Partisipatoris*, Jakarta, Halaman Moeka Publishing, 2016. Hal.1.

“Pemilihan umum merupakan implementasi dari penerapan Sila ke Empat Pancasila dan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak tahun 1945 hingga saat ini pemilihan umum banyak sekali mengalami perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, pelanggaran maupun manajemen pelaksanaannya.”²

Tujuan dari penerapan pemilihan umum ini sendiri adalah untuk mengimplementasikan sistem demokrasi dengan melalui pemilihan wakil-wakil rakyat di pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.

Pemilihan umum sebagai salah satu proses untuk memilih orang-orang dalam menduduki jabatan-jabatan politik tertentu, dan jabatan-jabatan tersebut ada beraneka ragam, mulai dari jabatan Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sampai pada pemilihan kepala desa.

Salah satu hal untuk menilai suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah keikutsertaan politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak dalam memilih. Semakin tinggi keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik. Sebaliknya, rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum maka dianggap sebagai tanda yang kurang baik hal ini dapat diartikan dengan kurangnya perhatian masyarakat terhadap negara.

Pemilihan umum secara filosofis juga sebagai salah satu perpanjangan tangan dan sarana dari kegiatan politik bagi warga negara. Partai politik

²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008. Hal. 369.

merupakan suatu wadah organisasi yang memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi politik seorang warga negara yang secara konstitusional diakui oleh banyak negara sebagai lembaga yang mewakili dan menjadi perantara antara pemerintah dengan rakyatnya.

Pemilihan umum juga mengenal yang namanya sistem ambang batas (*threshold*), ambang batas (*threshold*) ini merupakan angka batas minimal dukungan atau suara yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilu.

Penerapan ambang batas pada pemilihan umum dipandang sebagai alternatif untuk sistem multipartai yang kompleks, karena diharapkan ambang batas ini dapat mengurangi jumlah partai politik. Pernyataan ini dikuatkan oleh Didik Supriyanto, bahwa:

“Tujuan penerapan ambang batas pada pemilihan umum adalah pertama, mengurangi jumlah partai politik; kedua, menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya. Penerapan ambang batas ini memang mempersempit peluang partai-partai baru untuk meraih kursi parlemen. Namun fungsinya dibutuhkan guna menyingkirkan partai-partai yang gagal mendapatkan dukungan pemilih. Sebab, banyaknya partai politik peserta pemilu, tidak hanya membingungkan pemilih dalam memberikan suara, tetapi juga menelan banyak dana.”³

Banyaknya partai politik menjadi salah satu hambatan dalam mencapai efektivitas sistem pemerintahan di Indonesia. Karena ramainya partai politik yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi banyak dan rumit, sehingga mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi

³Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pemilu Demokratis, 2011. Hal.17.

ini tidak menjalankan agenda nasional secara efektif karena harus mempertimbangkan lebih banyak kepentingan. Maka diperlukan sarana untuk mengurangi banyaknya jumlah partai politik yang mengikuti pemilu di Indonesia dengan melalui penerapan ambang batas.

Adanya sistem ambang batas (*threshold*) dalam penerapan pemilihan umum diharapkan dapat mengatasi banyaknya jumlah partai politik untuk memperkuat sistem pemerintahan di masa yang akan datang. Tujuan diterapkannya sistem ambang batas, ini dikuatkan dengan pendapat dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa “ambang batas untuk pemilihan presiden dinilai memperkuat sistem pemerintahan presidensial.”⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut menerangkan bahwa pemberlakuan ambang batas sangat penting untuk menciptakan sistem presidensial yang lebih kuat. Salah satu penguatan sistem presidensial tersebut adalah dengan adanya aturan tingkat ambang batas dalam pengusungan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*).

Ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden juga harus memperhatikan apakah pelaksanaan *presidential threshold* tersebut telah selaras dengan konstitusi Republik Indonesia serta terjaminnya hak-hak warga negara yakni persamaan martabat baik didalam hukum maupun pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga memberikan jaminan terhadap hak

⁴M. daffa Alfaritsi dan Yoga Mulyadi, “Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2 No. 3 (Desember 2020). Hal. 1.

untuk memperoleh suatu pengakuan, jaminan perlindungan dan memperoleh kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan memberikan jaminan hak untuk bebas dari segala diskriminasi, yang semuanya itu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Adrian Wisnu Aditya tentang pengaturan pengusungan calon presiden:

“Mengenai pengaturan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Rumusan ini menghendaki secara opsional bahwa semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (koalisi).”⁵

Berdasarkan Pasal 6A tersebut, maka dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan adanya syarat ambang batas dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi didalam pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berlaku mensyaratkan adanya pemenuhan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*), yaitu ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

⁵Adrian Wisnu Adhitya, “Dampak Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol.9 No. 5 (Agustus 2020). Hal. 466.

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan konstitusional pelaksanaan pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lutfil Ansori, bahwa:

“*Presidential Threshold* ini sendiri merupakan pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*Seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.”⁶

Di samping itu, pelaksanaan penerapan ambang batas dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) perlu dijalankan secara profesional serta memperhatikan kestabilan antara politik hukum penyederhanaan partai politik dan perlindungan terhadap keberagaman politik serta tidak dapat dilakukan berdasarkan penilaian untung dan rugi yang didapat oleh partai politik yang telah dinyatakan sebagai anggota peserta

⁶Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017). Hal. 18.

pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun penerapan *presidential threshold* dilakukan secara profesional dan telah tertuang dalam Undang-Undang, pengaturan *presidential threshold* tetap menimbulkan pro kontra yang menyebabkan berbagai elemen masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena tidak bisa diterima oleh pihak-pihak yang mengalami kerugian hak konstitusional, dan juga pasal ini jelas memangkas harapan bagi partai politik.

Ketentuan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang menjadi perdebatan hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) pada putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpandangan bahwa ketentuan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) tersebut adalah guna penguatan sistem presidensial meskipun didalam putusan tersebut juga terjadi pendapat anggota majelis hakim yang berbeda (*dissenting opinion*).

Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR.⁷

⁷*Ibid.*, Hal. 20.

Menurut Mahkamah Konstitusi didalam buku Widayati tentang Problematika *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak Yang Berkeadilan menjelaskan bahwa “ketentuan *Presidential Threshold* akan memudahkan presiden apabila memerlukan persetujuan parlemen dalam membuat kebijakan, kerana Presiden mendapat dukungan mayoritas di parlemen.”⁸ Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Alfa Fitri dan Wicipto Sepriadi, bahwa:

“*Presidential Threshold* dimanfaatkan sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai, hal ini akan berimplikasi terhadap keberadaan Presiden yang membutuhkan adanya dukungan mayoritas dari parlemen. Tanpa dukungan tersebut, Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan sehari-hari akan menjadi kurang *desicive* (penentu).”⁹

Dengan adanya dukungan awal diparlemen melalui pelaksanaan ambang batas akan memberikan kemudahan bagi calon terpilih dalam menjalankan program-program kerjanya di masa yang akan datang. melihat dari pengalaman pemilu yang sebelum-sebelumnya yakni pada periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 yang hanya melahirkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuat masyarakat memilih calon yang tersedia dan belum tentu calon pilihan yang diinginkan oleh masyarakat.

Bagian yang sering dilupakan dalam demokrasi pada hakikatnya adalah mengadakan pilihan kepada masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya partai politik semata-mata hanya bertumpu dan berkoalisi dengan partai politik yang

⁸Widayati, “*Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Yang Berkeadilan*”, Semarang, Unissula Press, 2019. Hal. 4.

⁹Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, “*Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?*” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 (Maret 2022). Hal 72.

berkuasa sehingga hanya dapat memberi dukungan dan tidak mempunyai hak suara dalam mengusung calon kader partai politiknya sendiri sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh partai politik yang berkuasa.

Sebagaimana ketentuan partai politik peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Selanjutnya Pasal 415 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR disetiap daerah pemilihan.” Aturan dalam Pasal 414 dan 415 tersebut menimbulkan dampak untuk partai politik yang semakin sempitnya peluang dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini dapat berakibat pada munculnya 2 pasang bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dan bahkan dapat muncul calon pasangan tunggal sehingga suara rakyat tidak tersalurkan. Seharusnya dapat dipahami bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pemimpin, tetapi juga kepada legitimasi kekuasaan dan kekuasaan itu dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat.

Adanya ambang batas dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menimbulkan ketidakseimbangan di parlemen yang dibutuhkan setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat menyebabkan

terhambatnya program kerja Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih karena adanya tekanan dari partai berkuasa di parlemen.

Munculnya permasalahan karena tidak semua partai politik peserta pemilu dapat mengusung masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan bahwa partai politik tersebut tidak ikut serta pada pemilu sebelumnya atau tidak mempunyai perolehan suara atas kursi legislatif pada pemilu sebelumnya.

Ketika kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga timbulnya ketidakadilan dalam pemilu di Indonesia, serta terhambatnya pelaksanaan program kerja yang telah disusun Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilu yang dapat menjadi perdebatan apabila Presiden yang lahir bukan dari partai politik berkuasa di parlemen.

Penulis ingin menganalisis lebih dalam mengenai analisis sistem *presidential threshold* terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penulis tersebut diangkat dan dibahas ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “Analisis Sistem *Presidential Threshold* Terhadap Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Ambang Batas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Pengaturan *Threshold* Di Masa Yang Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ambang batas dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan *threshold* di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber referensi tambahan serta dapat dijadikan sebagai kontribusi keilmuan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut, terutama dalam studi hukum tata negara terkait penerapan ambang batas dalam pengusungan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan serta dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam memahami batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, salah satunya yaitu menurut Wirandi yang mengemukakan pendapatnya mengenai analisis yaitu, “aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.”¹²

2. Sistem

Sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu berdasarkan asas tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sistem adalah “beberapa unsur yang satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar”.¹³

Menurut Rusadi Kantaprawira yang mengartikan sistem sebagai :

“Suatu kesatuan yang berbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Masing-

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2015. Hal. 78.

¹¹*Ibid.*, Hal. 96.

¹²R.A.Dwi Ayu Puspitasari, Skripsi: “Analisa sistem Informasi Akademik (SISFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma”, Palembang, UBD 2020.

¹³*Ibid.*, Hal. 470.

masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.”¹⁴

3. Presidential Threshold

Presidential Threshold berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Istilah *presidential threshold* tidak dijelaskan dalam literatur ilmu hukum, istilah *Presidential Threshold* berdasarkan dari Bahasa Inggris, berasal dari 2 (dua) kata, yakni *Presidential* dan *Threshold*. Secara etimologi, frasa *Presidential* dapat dipahami berkaitan dengan presiden, sedangkan frasa *Threshold* dipahami berkaitan dengan batasan-batasan dari sebuah kompetisi.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan definisi dari *Threshold* atau batasan pencapaian sebagai jenjang litimasi yang bersifat tidak memaksa artinya dapat diterima atau ditoleransi. Secara terminology atau sistem *presidential threshold* merupakan batasan pencapaian kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai

¹⁴Rusadi Kantaprawira, “*Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*”, Bandung, Sinar Baru, 1985. Hal. 35.

¹⁵Dwi Rianisa Mausili, “Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Reduksi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia”, *jurnal: Bappenas Working Papers*, Vol. II, No. 1 (Maret 2019). Hal. 33.

politik dalam pelaksanaan pemilu anggota Legislatif untuk dapat mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden.¹⁶

Ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik sebagai peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, *Presidential Threshold* menjadi syarat untuk partai politik agar dapat mengusung pasangan calon Presiden atau Wakil presiden pada pemilihan umum, dan dapat dipahami sebagai batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki oleh peserta pemilu untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilu.

4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Soedarsono didalam bukunya tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit.*,Hal.510.

demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.”¹⁷

Rumidan Rabi’ah juga mengemukakan pendapatnya bahwa “pemilihan umum adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik”.¹⁸ Sedangkan, Ibnu Tricahyo, mendefinisikan “sistem pemilihan umum adalah suatu hal yang abstrak dengan tidak hanya melihat pemilihan umum secara teknis, melainkan pada nilai filosofisnya.”¹⁹

Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sekaligus sarana aspirasi serta kepentingan rakyat.²⁰ Pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh rakyat dalam suatu negara.²¹

F. Landasan Teori

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berakar pada doktrin

¹⁷Soedarsono, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2005. Hal.25.

¹⁸Asip Suyadi dan Abdul Azis, “Penerapan Nilai Konstitusi Pasca Pemilu Legislatif Tingkat Kotamadya Sebagai Upaya Merumuskan Kehidupan Demokrasi”. *Jurnal Of Law*, Vol. 3, No. 2 (November 2020). Hal. 80.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012. Hal.52-53

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Op.Cit.*,

Romawi, yaitu *lex regia* yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat.²²

Menurut Rousseau mengemukakan pendapatnya bahwa “Kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak, dan kedaulatan adalah kehendak umum.”²³

Teori kedaulatan ini juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu “tujuan negara adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya”. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri dan undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara.²⁴

2. Teori Demokrasi

Menurut David Beetham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa “demokrasi merupakan bagian dari khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif”.²⁵ Demokrasi juga merupakan suatu sistem politik yang

²²Isharyanto, “Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945”, Surakarta, Penerbit WR, 2016. Hal. 15.

²³Abu Daud Busroh, “Ilmu Negara”, Jakarta, Bumi Aksara, 2018. Hal. 74.

²⁴*Ibid.*,

²⁵Shofwan Rozi dan Heriwanto, “Demokrat Barat, Problem Dan Implementasi Di Dunia”. *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, edisi 2, (Desember 2019). Hal. 190.

bersendikan kedaulatan rakyat. Rakyat memilih, dan berpartisipasi, dalam proses politik.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan perwujudan keinginan cara keseluruhan semua orang dan dalam hal ini semua orang memiliki hak yang sama dan demokrasi juga merupakan indikator tentang sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis dapat diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dapat semakin nyata dalam mewujudkan pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan yang mengandung tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).²⁷

G. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan penerapan ambang batas pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden

²⁶*Ibid.*, Hal. 200.

(*presidential threshold*) dan pemilihan umum di Indonesia. Selain itu, analisis juga dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Klasifikasi Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan proses pengumpulan data pustaka dan data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, internet. Penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian ataupun dalam kaitannya dengan hal ini.

3. Bahan Hukum

a. Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh publikasi secara online maupun terbitan penerbit tentang dokumen-dokumen sejarah. Publikasi tentang dokumen-dokumen dibidang ilmu politik serta ilmu hukum tentang pemilihan umum dan *presidential threshold*, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, maupun komentar-komentar atau pandangan hukum tentang *presidential*

threshold. Penelitian kepustakaan dalam data sekunder ini dilakukan dengan mengutip pendapat ahli yang dapat mendukung penelitian ini.

c. Tersier

Penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber sesuai dengan penelitian ini yang digunakan sebagai tambahan atau pelengkap dari bahan primer maupun sekunder, yakni kamus maupun ensiklopedia serta bahan dari internet.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Tahap-tahap yang dilakukan dalam mengolah data setelah data diperoleh yakni:

- a. Seleksi data, dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut telah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, dilakukan dengan menempatkan data sesuai pada bidang serta pokok pembahasan agar dapat dengan mudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, dilakukan dengan melalui penyusunan data berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga dapat dengan mudah diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yang menjelaskan secara historis dan perbandingan argumentasi dalam beberapa fraksi untuk mendapatkan kesimpulan melalui metode deduktif, artinya memaparkan hal bersifat

umum terhadap permasalahan lalu akan menuju kepada permasalahan yang konkret

5. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Konseptual

Menurut Peter Mahmud menyatakan bahwa “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.”²⁸ Pendekatan konsep ini dilakukan melalui pendapat ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁹

Pendekatan ini mempelajari pendapat dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan pemikiran yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang penulis teliti. Melalui pendekatan konsep ini dapat menjadi tumpuan bagi penulis dalam memecahkan isu yang sedang penulis hadapi yakni tentang *presidential threshold*.

²⁸Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*”, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021. Hal. 133.

²⁹*Ibid.*, Hal. 147.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Menurut Irwansyah dalam bukunya tentang Penelitian Hukum menyatakan bahwa “Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.”³⁰

Penulis menggunakan pendekatan dilakukan dengan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang penulis hadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.”

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Penulis akan menganalisis

³⁰*Ibid.*, Hal 134.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya mengenai ketentuan *presidential threshold*.

c. Pendekatan Kasus

Menurut Irwansyah dalam bukunya tentang Penelitian Hukum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.”³¹

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan menelaah serta berfokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Pendekatan kasus ini menggunakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pada pendekatan kasus ini yang menjadi hal pokok yang akan diteliti pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, yang dapat digunakan penulis sebagai bahan argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang penulis teliti.

d. Pendekatan Sejarah

Menurut Irwansyah, pendekatan sejarah dapat diartikan sebagai “suatu pendekatan yang berfungsi untuk mengetahui dan mendalami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-

³¹*Ibid.*, Hal. 138.

undangan.”³² Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³³

Melalui Pendekatan sejarah akan dilakukan penelaahan dari sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai sejarah dan dilaksanakan secara sistematis. Dengan mengetahui dan memahami latar belakang sejarah dari isu hukum yang diteliti, kemudian dibuat peraturan perundang-undangan tersebut sangat membantu penulis untuk memahami sejarah dari isu hukum yang sedang diteliti dari waktu ke waktu. Penulis melakukan pendekatan dengan memahami dari sejarah pemilihan umum, ambang batas pemilihan umum serta *presidential threshold*.

³²*Ibid.*, Hal. 141.

³³*Ibid.*, Hal. 142.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menunjukkan keterkaitan antar bab dalam skripsi yang akan dibuat. Keterkaitan tersebut diuraikan dalam bentuk narasi pada setiap bab yang direncanakan mulai bab pendahuluan, tinjauan Pustaka, pembahasan dan penutup.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat tentang tinjauan tentang kedaulatan dalam negara, tinjauan tentang demokrasi, tinjauan tentang sistem pemerintahan, tinjauan tentang sistem *presidential threshold*, dan tinjauan tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan yang menjawab perumusan masalah, yakni ini akan dijabarkan serta memuat jawaban dari rumusan masalah, yakni Pengaturan ambang batas dalam Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan Pengaturan *Threshold* dimasa yang akan datang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan harus sejalan dengan masalah penelitian dan analisis. Sedangkan saran disusun berdasarkan kesimpulan pemikiran penulis atas permasalahan yang ditemui dalam penelitian yang merupakan kontribusi/sumbangan pemikiran dari penulis terhadap permasalahan hukum.